

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus (X1) dan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah (X2) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil analisis dengan software EViews, diperoleh bahwa model regresi memenuhi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), sehingga layak digunakan. Namun, nilai R Square sebesar 0,189 menunjukkan bahwa hanya 18,9% variasi akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, sedangkan sisanya 81,1% dipengaruhi faktor lain di luar model. Uji F membuktikan bahwa secara simultan kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Akan tetapi, hasil uji T menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana otonomi khusus (X1) berpengaruh signifikan (sig. 0,044 < 0,05), sedangkan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah (X2) tidak berpengaruh signifikan (sig. 0,521 > 0,05). Dengan demikian, hanya hipotesis pertama yang terbukti benar. Secara substansial, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Nabire lebih ditentukan oleh bagaimana dana otonomi khusus dikelola secara efektif, tepat, dan efisien, sementara transparansi

kinerja masih belum mampu memberikan kontribusi nyata tanpa adanya sistem pengawasan dan implementasi yang kuat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan responden

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada pengukuran variabel-variabel utama sesuai model yang diterapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat kepuasan responden secara lebih mendalam. Seharusnya, dengan menggunakan model tambahan seperti Expectation Satisfaction Disconfirmation (ESD) Model atau model serupa, pengukuran kepuasan responden dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Keterbatasan ini memungkinkan adanya aspek-aspek kepuasan yang tidak terukur dan dapat memengaruhi hasil penelitian.

2. Instrumen penelitian

Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengukur aspek yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang turut memengaruhi hasil.

3. Keterbatasan waktu

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan terbatas pada wilayah tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin berbeda apabila dilakukan pada waktu dan lokasi yang lebih luas.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Papua yang secara geografis cukup jauh dan menantang dari segi aksesibilitas. Meskipun peneliti telah bertemu langsung dengan responden,

keterbatasan infrastruktur dan jarak tetap menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan penelitian.

5. Keterbatasan literatur pembandingan

Beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan masih terbatas, sehingga justifikasi hasil penelitian belum dapat dibandingkan secara lebih komprehensif.

5.3 Saran

- a. Pemerintah Daerah Nabire perlu memperkuat sistem pengelolaan anggaran dana otonomi khusus agar lebih efektif dan tepat sasaran, karena faktor ini terbukti berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas keuangan.
- b. Transparansi kinerja instansi sebaiknya tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas data, aksesibilitas publik, serta mekanisme pengawasan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan agar tata kelola anggaran dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
- d. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti efektivitas pengawasan internal, kompetensi SDM, budaya organisasi, dan faktor regulasi pusat, sehingga model dapat menjelaskan variasi akuntabilitas keuangan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Rini, S. (2023). *Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus*
- Bardhan, P. (2013). *Decentralization and Development: Theory and Evidence*. *Journal of Economic Literature*, 48(2), 135–156.
- Djabu, M. (2023). *Implementasi Otonomi Khusus dan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Nabire*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah*.
- Herlina, L., et al. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Aksesibilitas, Pengendalian, dan Kompetensi Aparatur*.
- Herlina, R., Sari, M., & Putri, A. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 55–67.
- Husodo, A. (2019). *Transparansi Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Dana Otonomi Khusus di Wilayah Otonomi dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan*.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, H. W. (2024). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Perspektif Sistem dan Fungsi*.
- Nasution, H. W. (2024). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, D., & Fitriani, A. (2017). *Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Medan*.
- Putra, A., & Sari, D. (2023). *Peran Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus*. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 15(1), 88–100.
- Putra, B., & Sari, D. (2023). *Peran Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus*.
- Ramadhan, F., & Putra, A. (2022). *Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan*.
- Rantepulung, O., Mollet, J. A., & Ratang, W. (2023). *Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus di Papua*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua*.
- Setiawan, I., & Yuliana, T. (2018). *Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Bandung*.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, A., & Darmawan, A. (2020). *Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat*.
- Sutrisno. (2022). *Pengaruh Transparansi Dana Otsus terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*.
- Sutrisno. (2022). *Pengaruh Transparansi Dana Otsus terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(3), 112–125.
- Syafruddin. (2017). *Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik di Era Desentralisasi*.
- Wibowo, R., & Anisa, L. (2024). *Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*.

- Widiastuti, D. (2017). *Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yulia, D., & Arif, S. (2024). *Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik*.
- Yuliana. (2023). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan di Papua Tengah*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(4), 201–219.
- Yuliana. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Papua Tengah*.
- Yulianto, B., & Indah, N. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kota Surabaya*.